

MENGURAI UPAYA IMPLEMENTASI GREEN POLITICS: TANTANGAN DAN TINJAUAN PEMIMPIN MENDATANG

Esthy Reko Astuty^{1*}, Muhammad Aqshadigrama², Sisean Baga¹

¹ Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Jakarta

² Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

*e-mail: reko_budpar@yahoo.com

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan dan dampaknya merupakan persoalan yang masih terus berlanjut di Indonesia. Isu lingkungan nampaknya masih menjadi agenda yang sepele terhadap agenda politik lainnya. Hal ini terbukti dari gagalnya narasi isu lingkungan yang selalu dibawa oleh *civil society* terhadap setiap aktor politik atau partai politik, khususnya menjelang pemilu. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perlunya mendorong transformasi narasi politik hijau menjadi platform partai politik sebagaimana yang terjadi di negara lain. Tulisan ini mencoba menganalisis absennya keterwakilan narasi politik hijau dalam parlemen menggunakan pendekatan teori oligarki dan partai politik. Hasil analisis menunjukkan terdapat tiga faktor penyebab isu lingkungan hidup terus menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan agenda politik, yaitu; *Pertama*, rendahnya perhatian partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan lingkungan. *Kedua*, dominasi oligarki di partai politik dan parlemen dalam penguasaan SDA. *Ketiga*, tidak adanya representasi partai politik hijau di dalam parlemen. Oleh sebab itu, dibutuhkan keberanian dari partai politik dan tokoh politik sebagai calon pemimpin masa depan untuk menjadikan isu lingkungan sebagai agenda utama politiknya.

Kata Kunci: *Lingkungan, Civil Society, Dominasi Oligarki, Politik Hijau, Representasi Politik.*

ABSTRACT

Environmental damage and its impacts are ongoing problems in Indonesia. Environmental issues still seem to be a trivial agenda compare to the other political agendas. This is proven from the failure of the narrative on environmental issues that is always carried by civil society towards every political elite or political party, especially before elections began. This phenomenon indicates the need to encourage the transformation of green political narratives into political party platforms as it's happening in other countries. This paper try to analyze the absence of representation of green political narratives in parliament using the approach of oligarchic theory and political parties. The results of the analysis show that there are three factors that cause environmental issues always faced deadlocked, when dealing with political agendas, that is; *First*, low public participation and awareness of environmental sustainability issues. *Second*, the dominance of oligarchs in political parties and parliaments with the power to control of natural resources. *Third*, there is no representation of green political parties in parliament. Therefore, it takes courage from political parties and political figures as prospective leaders in future to make environmental issues as their political main agenda.

Keywords: *Environment, Civil Society, Oligarchic Domination, Green Politics, Political Representation.*

PENDAHULUAN

Berbagai fenomena krisis lingkungan yang tengah terjadi sampai saat ini, semakin dirasakan memburuk dari waktu ke waktu. Degradasi lingkungan menjadi panorama yang lumrah dipandang, pemanasan global, punahnya jenis-jenis spesies langka, kekeringan, langkanya air bersih, tercemarnya lingkungan serta polusi udara, bahkan sampai pada ancaman senjata biologis (Supratiwi, 2013). Sederet permasalahan dari berbagai masalah panjang lainnya dapat menggambarkan, bahwa betapa masalah lingkungan tidak dapat lagi dipandang sebelah mata, mengingat dampaknya akan menjadi bumerang yang menghancurkan peradaban umat manusia di saat ini, maupun di waktu mendatang.

Aspek pesatnya pertumbuhan demografi juga menambah permasalahan panjang krisis lingkungan, karena kebutuhan umat manusia akan ketergantungan terhadap alam semakin banyak dan semakin besar pula. Sayangnya, banyak kebutuhan manusia itu, semuanya masih didominasi bergantung dan bersandar pada ketersediaan yang ada di lingkungan alam. Sebagai contoh sederhana dapat terlihat dari aktivitas manusia yang masih terus melakukan perambahan hutan secara liar, sehingga berakibat pada penurunan kualitas tanah, banjir, punahnya spesies hewan serta tumbuhan, dan dampak buruk lainnya. Hal ini pun senada dengan apa yang dinyatakan oleh Oliver Tickell dalam Supratiwi (2013), bahwa manusia sudah memakai 30% lebih banyak dari apa yang bumi sediakan tiap tahun untuk kebutuhan manusia.

Masalah lingkungan bukanlah merupakan fenomena yang terjadi secara proses natural alamiah semata. Melainkan turut pula ada campur tangan manusia dalam menyebabkan rusaknya lingkungan hari ini. Dalam skala makro, penyebab krisis lingkungan seringkali terjadi akibat dari proses politik para aktor yang berkepentingan terkait SDA (sumber daya alam). Bryant dan Bailey (1997) kemudian menyebut peristiwa ini sebagai *politicised environment*, yaitu perubahan lingkungan terjadi sebagai konsekuensi dari politisasi lingkungan yang dilihat dari sumber politik, kondisi, serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial-ekonomi.

Oleh sebab itu, faktor pemangku kebijakan dari seorang pemimpin dalam suatu daerah atau elite politik memegang peran yang sangat penting terhadap keberlanjutan lingkungan melalui kebijakan politik yang dihasilkannya. Menurut Rektor IPB (Institut Pertanian Bogor) Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si. (2021), kerusakan SDA adalah masalah krisis tata kelola yang merupakan suatu kegagalan mengatur tindakan para aktor negara, pasar, dan masyarakat, yang berkepentingan terhadap sumber daya, karena jika berbicara tata kelola, maka membahas

mengenai negara, interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat, yang terkait dengan sumber daya alam. Beberapa akar masalah krisis sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya tergantung pada etika lingkungan yang antroposentrik, populasi penduduk yang terus meningkat, akumulasi kekayaan, kesenjangan dan kemiskinan, dan kegagalan kebijakan pembangunan (*policy failures*). Juga terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, serta lemahnya penegakan hukum, kegagalan pasar (*market failure*) atau tidak adanya mekanisme pasar (*no market mechanism*) pada beberapa SDA tertentu. Juga kapitalisasi global yang mendorong konsumsi untuk gaya hidup konsumtif (*life style/consumptive*), dan teknologi produksi dan jasa yang menjadi pemicu kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Dengan demikian, pada konteks ini solusi bergantung pada pendekatan dari setiap pemimpin atau tokoh politik yang memiliki perspektif berbeda. Atas dasar itulah, pentingnya penguatan rasionalitas ekonomi dan ekologi harus disejajarkan, antara lain melalui ekologi modern berbasis teknologi. Seringkali kebijakan politik lingkungan selalu berhadapan dengan pembangunan (ekonomi). Jika pendekatan ekonomi lebih dominan, maka terjadi kerusakan lingkungan, tetapi jika pendekatan ekologi lebih dominan yang terjadi tidak ada pertumbuhan ekonomi. Padahal terdapat pendekatan yang tidak harus selalu membenturkan kedua aspek tersebut. Salah satu contoh sederhananya, yaitu pengembangan teknologi ramah lingkungan, seperti limbah asap yang dikonfirmasi menjadi cairan untuk pupuk dan lainnya, *bio plastic*, seperti plastik singkong, dan lainnya. Ekonomi tumbuh, tapi tidak merusak lingkungan. Hari ini, teknologi ramah lingkungan sebagai alternatif. Di samping juga gerakan sosial, yang turut membangun *life style* ramah lingkungan, seperti *car free day*. Ada juga yang menarik di daerah Kuningan, Jawa Barat dalam pernikahan mengharuskan pengantin pria memberikan maharnya dengan menambahkan pohon, perhelatan dan akad nikahnya diselenggarakan secara ramah lingkungan, gerakan tumbler, toko tidak menyediakan kantong plastik, juga menjadi contoh penerapan kebijakan sederhana yang ramah lingkungan. Konsep pola pemikiran inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pemimpin politik di era saat ini.

Namun, gagasan solutif dan kampanye inovatif lingkungan seperti hal tersebut sering kali menemui jalan buntu dan tidak berhasil menjadi paradigma yang mengakar kuat dalam diri setiap calon penguasa hari ini. Dengan begitu, tidak heran apabila agenda-agenda mengenai pelestarian lingkungan masih saja dianggap sebelah mata oleh banyak para pemimpin hari ini. Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba menganalisis berbagai permasalahan lingkungan yang

terjadi di Indonesia, sehingga dibutuhkan kehadiran narasi politik hijau untuk keberlanjutan lingkungan, kemudian menganalisis mengapa gerakan lingkungan *civil society* gagal bertransformasi ke dalam kepentingan politik. Hal tersebut dirasakan penting, sebab inilah yang pada akhirnya dapat membentuk sikap pemilih sebagai warga negara yang bertanggung jawab pada kebijakan politik lingkungan dalam menaruh pilihan saat momentum pemilu (pemilihan umum) mendatang.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif, yang berupaya mengungkapkan fenomena sosial politik dengan jelas dan tepat. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur dari beragam sumber kredibel dan relevan yang dapat membantu menguatkan argumen dalam artikel ini. Setelah mengumpulkan berbagai sumber kajian literatur, kemudian disusun ke dalam bentuk satu tulisan yang utuh. Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan analisis dan memberikan gambaran mengenai gagalnya narasi lingkungan dalam setiap agenda politik saat ini.

PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Data Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Di Indonesia, sejumlah permasalahan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Persoalan ini menjadi sangat krusial, karena menyangkut kualitas kehidupan saat ini dan di masa mendatang. Setidaknya terdapat 10 permasalahan lingkungan di Indonesia yaitu sampah, banjir, pencemaran sungai, kerusakan ekosistem laut, pemanasan global, pencemaran udara, kesulitan air bersih, kerusakan hutan, abrasi, dan pencemaran tanah.

Data yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016, dan pada 2017 meningkat menjadi 67 ton. Disebutkan pula total luas hutan Indonesia sampai 2017 mencapai 124 juta hektar. Sejak 2010 sampai 2017, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga lebih dari 684.000 hektar per tahunnya. Terkait sumber pencemaran laut, limbah domestik mencapai 75%, limbah perkantoran dan daerah komersial mencapai 15% dan limbah industri mencapai 10%. Sedangkan, penyebab pencemaran laut yaitu limbah industri, pengecatan kapal, reklamasi, limbah rumah tangga, kegiatan pelabuhan dan pelayaran.

Selain itu, Pusat Oceanografi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dalam Tjumano (2018) juga mengeluarkan data yang menunjukkan bagaimana kerusakan lingkungan terjadi, sekitar 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi tidak baik dan hanya 6,39% dalam kondisi yang sangat baik. Pemanasan global dipicu karena pembakaran batu bara yang mencapai jumlah emisinya per tahun sebesar 9 miliar ton CO²; Adanya konversi lahan dan perusakan hutan dengan jumlah emisi mencapai 2,53 miliar ton CO²; dan aktivitas dan pemakaian energi, pertanian dan limbah dengan emisi mencapai 451 juta ton CO². Sementara itu, Korlantas Mabes Polri mengeluarkan data yang menyebutkan jumlah kendaraan yang terdaftar sampai 3 Januari 2017 mencapai 102.328.629 kendaraan. Kondisi ini menimbulkan masalah pencemaran udara. Data kematian akibat polusi udara mencapai lebih dari 165.000 orang (Kasmiruddin, 2018).

Sedangkan, data WHO (*World Health Organization*) di tahun 2017 menyebutkan, Jakarta dan Bandung masuk daftar 10 besar kota dengan pencemaran udara terburuk di Asia Tenggara (Dwi, 2018). Tingkat polusi udara Jakarta sangat mengkhawatirkan yang berada pada level 4,5 kali dari ambang batas yang ditetapkan WHO, dan tiga kali lebih besar dari standar yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

A. Perbandingan Gerakan Politik Hijau di Indonesia dan Berbagai Negara Dunia

Membahas soal hubungan antara kepentingan lingkungan dan kaitannya terhadap agenda politik, berarti perlunya memahami gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan masalah perlindungan lingkungan. Di Indonesia sendiri sudah terdapat berbagai macam LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau NGO (*non-governmental organization*) yang aktif dalam menyuarakan kepentingan lingkungan dan dampaknya, seperti *Greenpeace*, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), WWF Indonesia (*World Wide Fund for Nature*), Lindungi Hutan, FEOI (*Friends of The Earth*), dan lain sebagainya.

Namun berbeda dengan di Indonesia, persoalan lingkungan pada sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Jerman dan beberapa negara lainnya tidak hanya diperjuangkan oleh kalangan organisasi masyarakat sipil (*civil society*), melainkan terdapat partai politik hijau (*green party*) yang aktif dalam menyuarakan advokasi kebijakan lingkungan di pemerintahan. Misalnya, di Jerman terdapat *Bündnis '90/Die Grünen*, di Australia *Australian Green*, Mesir terdapat *Egyptian Green Party*, Britania Raya ada *Green Party of England and Wales* (GPEW), juga di

Taiwan *Taiwan Ludang*, *Midori no Tō* di Jepang, *Latvijas Zaļā partija* (LZP) di Latvia, dan lain sebagainya. Gerakan lingkungan di sejumlah negara tersebut telah berhasil bertransformasi menjadi sebuah partai politik hijau (Gahrton, 2015).

Perkembangan partai politik hijau (*green parties*) di dunia mengalami banyak dinamika, beberapa di antara mereka berhasil menempatkan perwakilan di parlemen sebagaimana yang terjadi di Jerman, Britania Raya, Brazil dan Swedia. Namun, di Peru, Mesir, Albania, dan Azerbaijan partai hijau tidak memiliki perwakilan di parlemen. Meski demikian, apabila melihat fenomena politik global baru-baru ini, setidaknya ada dua contoh kasus bagaimana agenda perubahan iklim yang mengemuka bisa menjadi penentu lanskap politik elektoral, yaitu seperti di Amerika Serikat (AS) dan Jerman. Di Amerika Serikat, anggaran terkait agenda iklim menjadi “sandra” dalam usaha meloloskan anggaran Presiden Biden di Kongres AS (Indikator, 2021).

Sementara di Jerman, Partai Hijau Jerman menjadi contoh gerakan politik hijau di banyak negara, pasalnya koalisi *Die Grünen* bersama dengan *Sozialdemokratische Partei Deutschlands* (SPD) berhasil memenangi pemilu Landtag di negara bagian Baden-Wurtemberg pada tahun 2011 dan menempatkan *Winfried Kretschmann* sebagai Perdana Menteri saat itu, mengalahkan *Christlich Demokratische Union Deutschlands* (CDU) yang berkuasa sejak tahun 1953. Popularitas Partai Hijau juga terus meningkat sampai tahun 2019, pemilihan umum Eropa menunjukkan blok partai-partai hijau yang cenderung beraliran kiri, menduduki peringkat keempat dalam pemilu dengan perolehan 69 kursi dari total 751 kursi. Angka itu meningkat jauh dari 17 kursi yang didapatkan dalam pemilu 2014 (VOA Indonesia, 2019). Bahkan baru-baru ini, secara mengejutkan pada 2021 Partai Hijau di Jerman juga mencetak sejarah dengan meraih perolehan suara tertinggi sebesar 15% dan menjadi salah satu partai penentu koalisi penyusun pemerintahan di Jerman (Indikator, 2021). Partai Hijau Jerman mampu menduduki posisi pertama, mengalahkan partai-partai mapan, dalam menggaet suara pemilih, khususnya pemilih muda. Juga, menduduki posisi ketiga dalam perolehan suara nasional (14%), hanya kalah dari SPD (25,8%) dan CDU (24,1 %). Artinya, isu lingkungan sudah menjadi isu seksi yang dilirik oleh kalangan pemilih, utamanya pemilih muda di Jerman (Wahono, 2023).

B. Hambatan Agenda Politik Lingkungan dalam Kontestasi Pemilihan Umum

1. Tingkat Dukungan Masyarakat Terhadap Agenda Lingkungan Pada Pemilihan Umum 2024

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pada tahun 2024 akan menggelar serentak pemilu dan pilkada (pemilihan kepala daerah). Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024 melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia (Farisa, 2022).

Momen ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Ketua KPU RI (Komisi Pemilihan Umum) Hasyim Asy'ari mengatakan, pemilu pada dasarnya bertujuan untuk membentuk pemerintahan di pusat dan daerah. Melalui pemilu, jabatan pemerintahan nasional yang meliputi presiden, anggota DPR, dan anggota DPD akan terisi. Begitu pula dengan jabatan pemerintah daerah yang mencakup kepala daerah serta anggota DPRD. Menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil.

Pada kaitannya soal kepentingan lingkungan dalam agenda politik, pemilu serentak ini menjadi momentum untuk bisa semakin memperjuangkan gerakan-gerakan narasi lingkungan, bahkan politik hijau. Karena aspek lingkungan kerap kali dikesampingkan oleh pemerintah. Sementara sangat mustahil mengharapkan partai-partai politik menjadi inisiator perjuangan lingkungan, dan terlebih justru belum ada partai politik di Indonesia yang mengusung ideologi hijau yang masuk secara struktural dalam pemerintahan. Padahal untuk memperjuangkan lingkungan secara mutlak diperlukan keberpihakan ideologis dan gerakan yang sistematis.

Hal ini akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia dalam memilih calon-calon pemimpin di pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Juga menjadi kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut, dan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungannya dengan jeli dan bijak memilih pemimpin dengan memperhatikan program-programnya yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*).

Akan tetapi, menurut laporan *Environmental Risk Outlook 2021* yang dikeluarkan oleh Verisk Maplecroft (2020) menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu lingkungan sebagai masalah utama, hanya sebesar 33%. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesadaran dalam memandang permasalahan lingkungan terendah kedua setelah Afrika Selatan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendorong isu lingkungan, akan berakibat memperparah dengan semakin tidak tertariknya para partai atau elite politik untuk memperhatikan dan menjadikan isu lingkungan sebagai agenda politiknya.

Dengan demikian dapat dipahami, menjelang pemilu 2024 mendatang, peluang untuk menyelaraskan agenda politik nasional lintas partai dengan narasi terkait agenda lingkungan menjadi penting untuk diketahui. Meskipun ada dorongan terus-menerus terkait aksi iklim dari masyarakat sipil dan gerakan lingkungan—terutama sejak COP Bali pada 2007—perubahan iklim hingga saat ini nyatanya belum menjadi salah satu agenda utama dalam diskursus platform politik partai maupun kandidat di Indonesia. Bahkan tujuh tahun terakhir tampaknya telah membawa Indonesia pada jalur yang menjauh dari isu agenda iklim serta perlindungan lingkungan dikarenakan fokus agenda pemerintahan Jokowi saat ini masih tertuju pada upaya untuk menarik investasi asing serta pertumbuhan ekonomi, dibanding memperhatikan isu lingkungan.

2. Oligarki dan Partai Politik

Aspirasi mengenai kerusakan lingkungan dan dampak kerusakannya terus disuarakan oleh kalangan *civil society*, agar tidak luput dari agenda kepentingan elite partai politik. Baik besar atau kecilnya gaung aspirasi tersebut yang dibawakan setiap kontestasi pemilu, menunjukkan bahwa isu lingkungan tidak pernah absen setiap tahunnya. Konsistensi itulah yang akhirnya digunakan oleh para elite politik untuk mendekati kelompok-kelompok kepentingan tersebut dalam meraih suara mereka. Akan tetapi, agenda-agenda lingkungan nyatanya sangat jarang dibawakan oleh para elite politik sebagai agenda politik utamanya sendiri ketika terpilih atau setelah berhasil memegang jabatan. Narasi-narasi isu lingkungan tidak cukup besar digaungkan para elite dan partai politik.

Alhasil, lagi-lagi keterlibatan gerakan lingkungan dalam politik diimplementasikan dalam berbagai bentuk, lembaga masyarakat atau gerakan masyarakat itu sendiri secara *volunteer*. Bentuk gerakan politik lingkungan atau yang kemudian disebut sebagai politik hijau di Indonesia sampai saat ini diimplementasikan hanya sebatas dengan pengajuan petisi,

gugatan atas kebijakan, dan ujung-ujungnya aksi mobilisasi massa. Sementara itu, contoh gerakan aksi mobilisasi massa yang dilakukan kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan sudah sangat sering terjadi mulai dari isu perubahan iklim, kebakaran hutan, reklamasi, dan lain sebagainya. Tetapi, wujud dari hasil mobilisasi massa tersebut nihil, tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan kebijakan atau keputusan politik menjadi lebih ramah terhadap isu lingkungan.

Terkait persoalan kerusakan lingkungan, nampaknya sulit percaya pada proses hukum yang terjadi, jika selama ini perusahaan sering kali memenangkan pengadilan. Sekalipun kelompok masyarakat atau aktivis lingkungan memenangkan gugatan biasanya tidak bertahan lama sebelum akhirnya digugat kembali. Berbagai kalangan akademisi maupun aktivis lingkungan menilai bahwa sulitnya aspirasi dan penegakkan hukum mengenai permasalahan terhadap lingkungan hidup ini tidak terlepas dari adanya oligarki yang memainkan peranan besar dalam ekonomi dan politik yang pada akhirnya mempersulit proses penegakkan hukum.

Dominasi oligarki pasca Reformasi berbeda dengan sebelumnya pada masa Orde Baru, di mana para oligarki di era Orde Baru cukup memiliki kedekatan dengan keluarga Soeharto ataupun para petinggi militer (Sugiarto, 2018). Akan tetapi, pasca jatuhnya Soeharto tahun 1998 tidak serta-merta menghilangkan para pemilik modal, menurut Winters (2011) oligarki itu tetap ada namun berubah dari “Oligarki Panglima” atau oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa (kekerasan) secara langsung pada dirinya menjadi “Oligarki Kolektif” yakni oligarki yang berkuasa melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Kekuasaan oligarki bersumber dari kekayaan atau harta (*property*) dan pendapatan (*income*).

Pada masa Reformasi saat ini, pemaknaan dari hadirnya oligarki tidak hanya meliputi akumulasi kekayaan dan pendapatan, tetapi juga pertahanan kekayaan dan pendapatan. Para pemodal besar sekarang tidak membentuk kekuatan secara mandiri, melainkan berelasi dengan kekuatan elite politik. Karena di sisi lain elite politik juga mendapatkan keuntungan dengan pengembangan wilayah politik. Akhirnya, inilah yang mendorong para oligarki untuk berlomba juga menduduki jabatan dan menjadi elite politik agar dapat berkuasa sepenuhnya. Sebab, era Reformasi menjadikan oligarki tetap tidak dapat seenaknya terhadap elite politik yang tetap memiliki pengaruh yang kuat melalui kebijakannya. Oleh sebab itu untuk mempertahankan kekayaannya, oligarki harus menjalin kerja sama dengan elite politik atau terlibat langsung ke dalam politik.

3. **Ketiadaan Representasi Partai Politik Hijau di Parlemen**

Memandang gerakan politik hijau sebagai respon dari kerusakan lingkungan dan dampaknya, yang diperjuangkan oleh kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan di Indonesia, pada dasarnya bersumber dari perspektif konstitusional, institusional, dan paradigmatis. Kerangka berpikir mazhab realis yang memandang perlunya keamanan sebagai solusi atas persoalan kerusakan lingkungan (Hardin, 1968). Kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang merugikan masyarakat kecil dan lingkungan tidak jadi pertimbangan para politisi dalam membuat kebijakan.

Sepanjang perjalanan sejarah, kekayaan material yang terkonsentrasi pada kelompok kecil selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang kekayaan tersebut (Winters, 2011: 9). Sebagaimana bentuk dominasi kekuasaan lainnya akan menimbulkan adanya perlawanan. Aspinall (2014) dan Mietzner (2014) mencontohkan bahwa idealnya dalam kasus perlawanan oligarki, ancaman terhadap dominasi oligarki itu justru datang dan berasal dari elite pemerintah, politisi, dan aktivis.

Akan tetapi, khusus terkait narasi politik hijau di Indonesia, sejauh ini pergerakan perlawanan oligarki hanya diperjuangkan oleh LSM dan aktivis lingkungan seperti Walhi, Greenpeace, dan yang lainnya (Susanti dan Afrizal, 2018). Ketidakhadiran narasi politik hijau dalam bentuk keterwakilan formal memang tidak menjamin rendahnya pertimbangan lingkungan dalam pembuatan keputusan. Namun dalam sistem demokrasi keterwakilan sangat penting, selain untuk menyetarakan identitas juga untuk menghadirkan alternatif pertimbangan. Menurut Hannah Pitkin dalam Arnesen dan Peters (2018) representasi politik adalah upaya menghadirkan yang tidak hadir. Pitkin juga membagi representasi ke dalam empat model, yakni representasi formal, deskriptif, substansi dan simbolik. Salah satu kekuatan dari representasi formal dibanding representasi yang lain adalah *acting with authority*.

Sebagaimana dari penjelasan sebelumnya bahwa sebenarnya upaya transformasi keterwakilan formal di Indonesia pernah beberapa kali dilakukan (1980, 1998, 2007, dan 2012) oleh Walhi, sejumlah *civil society*, dan aktivis lingkungan lainnya, namun selalu berujung kegagalan. Tidak berhasilnya pendirian Partai Hijau ini menurut Chairil Syah dalam (Bolqiah dan Raffiudin, 2020), karena kuatnya polarisasi internal dalam setiap pertemuan

antara orang-orang yang setuju pendirian partai dan yang hanya menginginkan cukup sebagai organisasi masyarakat saja. Gagalnya mencapai kesepakatan ini terus berulang ini dikarenakan ada pro-kontra yang terjadi di internal aktivis lingkungan itu sendiri. Proses pendirian partai juga terhambat karena selama ini keuangan hanya didasarkan dari Walhi. Dengan kata lain, isu lingkungan nyatanya tidak menarik banyak investor untuk mensponsori pendirian partai apalagi oligarki.

Sementara itu, menurut Muhammad dan Abraham (2016) dalam tulisannya menambahkan perspektif lain, ia melihat bahwa kesadaran masyarakat juga menjadi pengaruh kuat dalam pendirian partai ini. Sayangnya, lemahnya kesadaran dukungan masyarakat akan kerusakan lingkungan dan kebutuhannya untuk memperbaiki lingkungan menjadi penyebab partai ini gagal. Sebab di dalam tubuh masyarakat sendiri, terdapat paradoks, yaitu “masyarakat anti partai politik, tetapi masyarakat sadar membutuhkan partai politik untuk menentukan kemenangan agenda publik.” Sentimen buruk terhadap kinerja partai politik inilah membuat masyarakat kurang mendukung. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab Partai Hijau kesulitan berkembang di Indonesia.

Permasalahan lain dari ketidakhadiran PHI adalah pemilu, salah satu di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik merupakan upaya dari para oligarki untuk mempertahankan pendapatannya dari pihak-pihak yang mengancam dalam hal ini partai baru. Misalnya syarat pendirian partai politik harus terdapat di 100% provinsi, 75% Kabupaten/kota dan 50% kecamatan (Pasal 3). Selain itu pada UU tersebut batas maksimal sumbangan ke partai politik dalam 1 tahun adalah 7,5 Miliar, naik 3,5 Miliar dari UU Partai Politik Tahun 2008. Selain sangat memberatkan, masalah lainnya adalah persyaratan itu hanya berlaku untuk partai baru, sedangkan tidak dengan partai lama, hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018. Artinya, setiap partai mesti memiliki basis massa dan modal yang kuat dan partai tanpa pemodal cenderung sulit untuk berkompetisi dan pada saat yang sama aturan yang diproporsional tersebut akan menguntungkan partai besar (Bachtiar et al., 2020). Artinya hambatan pembentukan partai politik hijau tidak serta merta dihadapkan dengan keinginan atau kesadaran masyarakat, tetapi juga terdapat adanya pengaruh dari sistem.

Selain itu, kaitan lain antara rekayasa pemilu dengan sistem kepartaian dijelaskan dengan detail melalui Hukum Duverger (*Duverger Laws*). Menurut Duverger (1972) terdapat efek

mekanis dan efek psikologis dalam aturan-aturan pemilu. Efek mekanis menegaskan kurang terwakilinya partai ketiga (partai baru atau partai kecil) karena aturan-aturan seperti ambang batas (*threshold*). Efek mekanis ini kemudian mempengaruhi para pemilih yang mendukung partai kecil/partai baru yang secara psikologis terdorong untuk tidak menyia-nyiakan suara mereka, sehingga pada akhirnya terpaksa memilih partai besar yang berpotensi lolos pemilu.

Dengan demikian, Chairil Syah dalam Bolqiah dan Raffiudin (2020) berpendapat akan sulit melihat para pemodal di Indonesia memberikan pendanaan pada partai Hijau untuk ikut kontestasi, sebab justru mereka sendiri adalah oligarki. Menurutnya, aktivis lingkungan perlu memberikan penawaran lain kepada mereka. Ketidaksesuaian isu yang diperjuangkan oleh PHI dengan para pemodal-lah yang juga akan menyulitkan, bagaimanapun para aktivis lingkungan sudah menyadari bahwa akan sulit sekali berkontestasi dengan partai-partai yang sudah ada lebih dahulu, yang justru memiliki para pemodal besar, maka yang perlu dilakukan adalah mesti menyusun rencana lain yakni menanamkan militansi pada masyarakat (Bolqiah dan Raffiudin, 2020).

C. Mendorong Keberpihakan Partai Politik Terhadap Agenda Kebijakan Politik Masa Depan Berbasis Lingkungan

Fenomena politik di Jerman sangat menarik untuk ditinjau kembali terkait relevansinya pada proyeksi pemilu 2024 dan mendatang di Indonesia. Partai Hijau di sana ternyata mampu meraup peraihan elektoral secara signifikan pada kalangan anak muda Jerman, pemilih pemula dalam rentang usia 16 tahun sampai 24 tahun. Sebagaimana generasi muda dikenal sebagai pemilih yang lebih condong pada apa yang dekat dan sesuai dengan realita yang dirasakan mereka. Oleh sebab itu, pemilih muda erat sebagai pemilih rasional, di mana ciri wawasan serta kemauan membaca program partai-partai politik dan kebijakan pemerintah, membuat isu lingkungan seperti pemanasan global yang terjadi saat ini bisa menjadi perhatian isu terpenting bagi kalangan pemilih muda untuk memilih tokoh politik saat ini.

Proyeksi pemilih pada pemilu 2024 nanti, akan didominasi oleh generasi muda. Hasil survei CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*) menyatakan bahwa generasi Z dan milenial dengan rentang usia 17-39 tahun mencapai 60% dari total pemilih di Indonesia. Artinya terdapat lebih dari setengah dari total peserta pemilih merupakan generasi muda. Dengan demikian, generasi muda seharusnya bisa menjadi pengarah dan penentu dalam

mendorong narasi isu lingkungan hadir dalam setiap agenda elite politik saat ini. Walaupun secara umum, dominasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih menunjukkan memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya isu lingkungan dalam agenda politik.

Tetapi, khusus bagi generasi muda, berdasarkan hasil temuan survei Indikator (2021) tingkat kesadaran dari pemilih muda dan pemula (Gen-Z dan millennial) lintas partai politik atas isu perubahan iklim dan lingkungan sudah sangat tinggi mencapai 82%. Mayoritas pemilih kelompok usia Gen-Z dan milenial (81%) lintas partai politik di Pileg 2019 lalu secara meyakinkan mayoritas menjawab perlindungan dan pelestarian lingkungan harus diutamakan meski harus memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Persepsi pemilih muda atas tingkat perhatian partai-partai politik di Indonesia dalam mengatasi krisis iklim masih rendah. Tidak ada partai politik yang dominan dipersepsi oleh pemilih pemula memberikan perhatian yang cukup sejauh ini terkait isu krisis iklim atau pelestarian lingkungan. Ini merupakan peluang strategis bagi partai-partai dan para elite politik untuk mulai memperhatikan melibatkan berbagai *stakeholders* masyarakat sipil dalam penyusunan agenda krisis iklim ke dalam platform partai guna menarik serta mengetahui apa yang menjadi perhatian atau fokus dari blok strategis pemilih muda dan pemula kalangan Gen-Z dan milenial, sehingga dapat meraih suara mereka yang mencapai sekitar 60% dari populasi pemilih di Pemilu 2024.

Berikutnya, sebanyak hampir 70% generasi muda memilih tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan “saya memilih calon presiden dan calon legislatif yang sama dengan pilihan keluarga.” Hasil ini menunjukkan bahwa generasi muda cenderung mandiri dalam memilih, tidak ingin mengikuti preferensi lingkaran pengaruh terdekat. Pemilih muda juga tidak ideologis, dan sangat independen dalam menentukan pilihan politik mereka (Prihatini, 2018). Oleh sebab itu, secara politik, partai yang menerapkan “politik lingkungan” akan punya prospek elektoral cerah. Sebab, merujuk pada John Muhammad dan Khalisah Khalid dalam Wahono (2023), “politik hijau” bersifat non-divisif. Artinya, politik ini mampu menyatukan semua pihak dalam satu kepentingan universal: melestarikan bumi dan melanggengkan masa depan. Jenis politik ini mampu mempertemukan dan mempersatukan orang dari berbagai lingkungan. Rasanya tidak ada satu pun pemilih (*voter*) yang akan membantah bahwa partai politik dan tokoh pemimpin perlu menjaga bumi. Jadi, politik ini bersih dari benih prasangka apa pun dan sanggup melintas bebas untuk merangkul jenis ideologi apa pun. Artinya, partai

politik yang mengangkat “politik hijau” atau “politik lingkungan” justru akan memperlebar basis pemilihnya.

Dengan adanya keberpihakan dan partisipasi generasi muda yang besar terhadap lingkungan inilah yang akan bisa mendorong kesadaran partai politik, tokoh politik, dan calon pemimpin untuk menjadikan isu lingkungan sebagai agenda politik utama mereka, bukan hanya sebatas janji kampanye belaka. Jumlah demografi pemilih muda, diprediksi akan masih terus bertambah pada pemilu berikutnya setelah 2024. Maka prospek elektoral bagi partai yang menerapkan “politik lingkungan” akan sangat menarik. Tinggal apakah ada keberanian bagi partai politik, tokoh politik, dan calon pemimpin untuk mulai mengusung agenda itu.

KESIMPULAN

Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan gagalnya narasi isu kepentingan lingkungan dalam kontestasi politik saat ini. *Pertama*, masih rendahnya perhatian dan partisipasi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh janji politik kandidat dan partai politik menjelang pemilihan umum terhadap narasi politik hijau yang tidak terealisasi, sehingga menjadikan isu lingkungan hanya sebagai komoditas strategi politik untuk meraup perhatian serta suara publik. Meskipun terdapat gerakan partisipasi masyarakat terkait isu lingkungan sangat jarang sekali yang berhasil mempengaruhi kebijakan politik.

Kedua, kehadiran dominasi oligarki dalam konsentrasi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta dampaknya terhadap kerugian negara dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Lingkungan sebagai sumber daya alam pada dasarnya merupakan sumber pendapatan oligarki yang konsentrasi pengelolaan dan penguasaannya sering kali berdampak pada ketimpangan material, kerugian negara dan perilaku korupsi. Melalui keuntungan dari sumber daya alam itulah oligarki mampu dan senantiasa mempertahankan pendapatannya misalnya dengan menyewa profesional, mensponsori kandidat dalam pemilihan umum, mendirikan partai politik untuk mempengaruhi proses kebijakan bahkan sampai melakukan penyuapan.

Ketiga, kesadaran yang juga penting dan lebih mendesak selain kesadaran akan lingkungan adalah kesadaran akan keterwakilan lingkungan dalam sistem politik di Indonesia. Tidak adanya keterwakilan politik yang sampai saat ini tersebar di parlemen. Hal ini

disebabkan, transformasi narasi politik hijau di Indonesia kurang mendapat dukungan dari masyarakat, juga terhambat oleh pro-kontra internal, aturan-aturan pendirian partai dan mekanisme pemilihan umum. Kekuasaan dan keterwakilan narasi politik hijau dalam bentuk platform partai politik dapat membatasi dan menghambat dominasi oligarki. Pengawasan juga akan lebih efektif jika dilakukan oleh keterwakilan politik hijau dalam bentuk partai politik dibanding sekedar menuntut perbaikan regulasi dan penegakkan hukum yang jauh lebih sulit ditengah-tengah eksistensi oligarki dan kepentingan para politisi dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk kontestasi pemilihan umum.

Berbagai persoalan dari dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia hari ini, sudah seharusnya semakin menegaskan bahwa kehadiran narasi politik hijau untuk menjadi suatu agenda politik utama terus dibutuhkan agar terus digaungkan bersama. Atas dasar itu, faktor keterwakilan politik di dalam parlemen menjadi penting ataupun kehadiran partai politik yang berorientasi pada keberpihakan lingkungan berkelanjutan, sehingga setiap kontestasi menjelang pemilu dapat menghasilkan pemimpin negara yang bertanggung jawab pada lingkungan. Sebab, satu kehendak politik yang kuat sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi krisis lingkungan. Adapun kehendak politik itu hanya bisa termanifestasi jika ada partai politik yang memperjuangkan isu-isu dan mewakili kepentingan lingkungan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnesen, S., dan Peters, Y. 2018. The Legitimacy of Representation: How Descriptive, Formal, and Responsiveness Representation Affect the Acceptability of Political Decisions. *Comparative Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/0010414017720702>
- Aspinall, E. 2014. Popular agency and interests in Indonesia's democratic transition and consolidation. In M. Ford dan T. B. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarch: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics* (pp. 117–13). Cornell Southeast Asia Program Publications. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0011>
- Aspinall, E., dan Barends, W. 2019. *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

- Bolqiah, Bachtiar, L. H., dan Andrean, S. 2020. Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73–92. ISSN: 2541-2078
- Bolqiah, Luthfi Hasanah dan Raffiudin, Riady. 2020. Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151-167.
- Bryant, R dan Bailey, S. 1997. *Third World Political Ecology*. London: Routledge.
- CNN Indonesia. 2018. *Total 326 Orang Jadi Tersangka Korupsi SDA Selama 2010-2017*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427144107-20-294128/total-326-orang-jadi-tersangka-korupsi-sda-selama-2010-2017>
- Duverger, M. 1972. The Forms of Political Conflict. *The Study of Politics*. https://doi.org/10.1007/978-94-009-3171-8_6
- Dwi, D. 2018. *Jakarta dan Bandung dua kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara*. Antara Megapolitan. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/36759/jakarta-dan-bandung-dua-kota-dengan-kualitas-udara-terburuk-di-asia-tenggara>
- Farisa, Fitria Chusna. 2022. *Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan*. msn.com <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan/ar-AAXZyWY>
- Gahrton, Per. 2015. *Green Parties, Green Future: From Local Groups to the International Stage*. London: Pluto Press.
- Global Greens. 2021. *Global Greens Federations and Members*. Global Greens. <https://www.globalgreens.org/member-parties>
- Hadiz, V. R., dan Robison, R. 2013. The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>
- Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. *Science*, 162, 1243–1248. <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>
- Indikator. 2021. Survei Nasional: Persepsi Pemilih Pemula dan Muda (Gen-Z dan Milenial) atas Permasalahan Krisis Iklim di Indonesia. Indikator. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/10/Materi-Rilis-Diseminasi-Surnas-Perubahan-Iklim.pdf>
- Kasmiruddin. (2018). *102 Juta Kendaraan Ikut Cemari Udara, Polygon Galakkan Bersepeda Mendukung Environment Indonesia Menjadi Lebih Baik*. Babel Review.

<https://babelreview.co.id/102-juta-kendaraan-ikut-cemari-udara-polygon-galakkan-bersepeda-mendukung-environment-indonesia-menjadi-lebih-baik>

- Katz, R. S., dan Mair, P. 1995. Changing models of party organization and party democracy: The Emergence of the Cartel Party. *Party Politics*, 1(1), 5–28. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- Katz, R. S., dan Mair, P. 2009. The cartel party thesis: A restatement. *Perspectives on Politics*, 7(4), 753–766. <https://doi.org/10.1017/S1537592709991782>
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2019. *Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018*. KPK RI. <https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf>
- Kusno, A. 2011. The green governmentality in an Indonesian metropolis. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 32(3), 314–331. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9493.2011.00440.x>
- Lay, C. 2007. Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(2), 153–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10994>
- Mast, J. 2013. Politik Lingkungan Internasional. In J. T. Ishiyama dan M. Breuning (Eds.), *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21* (1st ed.). PT Kharisma Putra Utama.
- Mietzner, M. 2014. Oligarchs, Politicians, and Activists: Contesting Party Politics in Post-Suharto Indonesia. In *Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics* (pp. 99–116). Cornell Southeast Asia Program Publications. <https://doi.org/10.7591/9781501719158-008>
- Muhammad, J., dan Abraham, D. 2016. *Lengan Politik Masyarakat Sipil: Pengalaman*. Harian Indoprogres. <https://indoprogres.com/2016/10/lengan-politik-masyarakat-sipil-pengalaman-dan-ikhtiar-partai-hijau-indonesia/>
- Prihatini, Ella S. 2018. “Selera Politik” Pemilih Muda Indonesia–Partai Lama, Capres Sipil. The Conversation. <https://theconversation.com/selera-politik-pemilih-muda-indonesia-partai-lama-capres-sipil-90825>
- Qodriyatun, S. N. 2008. Isu Lingkungan dalam Pilkada13-18. *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 4(2), 13–18.

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-X-2-II-P3DI-Januari-2018-189.pdf

- Robison, R., dan Hadiz, V. R. 2004. Theories of Change and The Case of Indonesia. In *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (pp. 18–39). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203401453_chapter_1
- Sugiarto, N. K. 2018. Bisnis Militer Pasca Orde Baru. *CosmoGov*, 4(2), 237–246. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17064>
- Supratiwi. 2013. Partai Politik dan Politik Hijau: Studi tentang Kepedulian Parpol terhadap Politik yang Pro-lingkungan di Kota Semarang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 109–117. <https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.109-117>
- Susanti, N., dan Afrizal, A. 2018. Upaya Greenpeace Menjaga Kawasan Pantai Indonesia Terkait Proyek Pulau Reklamasi Teluk Jakarta. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 5(1), 1–18. ISSN: 2355-6919.
- Susilo, Rachmad K Dwi. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjumano, Datuak. 2018. *Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Intelijen. <https://jurnalintelijen.net/2018/07/03/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>
- Verisk Maplecroft. 2020. *Environmental Risk Outlook 2021*. Maplecroft.com.
- VOA Indonesia. 2019. *Partai Hijau di Jerman, Perancis, Inggris Rayakan Perolehan Besar dalam Pemilu Eropa*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/partai-hijau-di-jerman-perancis-inggris-rayakan-perolehan-besar-dalam-pemilu-eropa/4934167.html>
- Wahono, Satrio. 2023. *Urgensi Politik Hijau*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/28/urgensi-politik-lingkungan>
- Winters, J. A. 2011. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.